

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG  
DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA  
TIMUR**

**PROSES PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KESEHATAN DI TINGKAT PROVINSI JAWA  
TIMUR TAHUN 2019**



**Oleh :**

**TASHYA ANGELIE TAMARA**

**NIM. 101611133035**

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS  
AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2020**

**i**

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG**

**DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**Disusun oleh :**

**TASHYA ANGELIE TAMARA**

**NIM. 101611133035**

**Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh :**

Pembimbing Departemen,

Surabaya, 9 April 2020



Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM, M.Kes  
NIP. 19860323201504100

Pembimbing di SDM, Dinas  
Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 9 April 2020



drg. Rifanda Bachraini Firdaus  
NIP. 198406072011012010

Mengetahui,  
Ketua Departemen Administrasi dan  
Kebijakan Kesehatan

Surabaya, 9 April 2020



Dr. Setya Haksama, drg., M.Kes  
NIP. 196509141996011001

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Magang .....	2
1.2.1 Tujuan umum .....	2
1.2.2 Tujuan khusus .....	2
1.3 Manfaat Magang .....	3
1.3.1 Bagi Dinas Kesehatan Kota Surabaya .....	3
1.3.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga .....	3
1.3.3 Bagi Mahasiswa .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>4</b>
2.1 Dinas Kesehatan.....	4
2.2 Perencanaan.....	4
2.2.1 Definisi Perencanaan .....	4
2.2.2 Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Menurut Schuler.....	4
2.2.3 Tujuan Perencanaan.....	5
2.3 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.....	6
2.3.1 Definisi Perencanaan Kebutuhan SDM .....	6
2.3.2 Tujuan Perencanaan Kebutuhan SDM.....	7
2.3.3 Konsep Perencanaan Kebutuhan SDM .....	7
2.3.4 Metode Perencanaan Kebutuhan SDM.....	8
2.3.5 Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM.....	9

2.3.6 Pendekatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM	15
<b>BAB III METODE KEGIATAN</b>	<b>16</b>
3.1. Rancang Bangun Kegiatan	16
3.2. Lokasi Pelaksanaan	16
3.3. Waktu Pelaksanaan	16
3.4. Metode Pelaksanaan	17
3.5. Data yang dikumpulkan	18
3.6. Teknik Pengumpulan Data	18
3.7. Teknik Analisis Data	18
3.8. Kerangka Operasional	18
3.9. Output Kegiatan Magang	19
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>18</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Surabaya	18
4.1.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Surabaya	18
4.1.2 Struktur Organisasi	19
4.2 Gambaran Umum Bidang Sumber Daya Kesehatan	20
4.3 Gambaran Umum Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	20
4.4 Bagan Alir ( <i>flowchart</i> ) Proses Perencanaan Kebutuhan SDM Dinkes Prov Jatim	24
4.5 Proses Perencanaan kebutuhan SDM di Tingkat Provinsi Jawa Timur	25
4.6 Proses Perencanaan Kebutuhan SDM berdasarkan Konsep Perencanaan	31
4.7 Proses Perencanaan Kebutuhan SDM di Dinkes Prov berdasarkan Teori	36
4.8 Kesesuaian Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan SDM di Dinkes Prov dengan Teori	38
4.9 Hambatan Proses Penyusunan Perencanaan Kebutuhan di Provinsi	39

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>41</b>
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>3.1</b>	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang	<b>16</b>
<b>4.1</b>	Menetapkan Waktu Kerja Tersedia (WKT) dalam 1 Tahun	<b>27</b>
<b>4.2</b>	Contoh :Menetapkan Komponen Beban Kerja dan Norma Waktu	<b>28</b>
<b>4.3</b>	Contoh : Menetapkan Standar Beban Kerja di Seksi SDM Kesehatan Provinsi	<b>28</b>
<b>4.4</b>	Menghitung STP dan FTP Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	<b>29</b>
<b>4.5</b>	Contoh : Standar Ketenagaan Minimal Tenaga Kesmas di Puskesmas Berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014	<b>30</b>
<b>4.6</b>	Contoh : Standar Ketenagaan Minimal Dokter umum di Rumah Sakit A,B,C, dan D Berdasarkan Permenkes No.56 Tahun 2014	<b>30</b>
<b>4.7</b>	Rentang Waktu Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan SDM di Dinas Kesehatan Provinsi	<b>32-33</b>
<b>4.8</b>	Tahap Perencanaan Kebutuhan SDM	<b>35-36</b>
<b>4.9</b>	Kesesuaiaan Proses Perencanaan Kebutuhan SDM di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Teori	<b>38-39</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Nomor	Judul Tabel	Halaman
<b>1</b>	Kerangka Operasional	<b>18</b>
<b>2</b>	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	<b>21</b>
<b>3</b>	Bagan alir ( <i>flowchart</i> ) Proses Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	<b>24</b>

## DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH

### Daftar Arti Lambang

% = Persen

/ = Atau

### Daftar Arti Singkatan

ABK = Analisis Beban Kerja

PNS = Pegawai Negeri Sipil

SDMK = Sumber Daya Manusia Kesehatan

SKN = Sistem Kesehatan Nasional SKM

SKM = Standar Ketenagaan Minimal

UPT = Unit Pelaksana Teknis



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau besar sebanyak 5 buah dan 17.000 pulau kecil. Melihat kondisi ini, maka akses untuk mendapatkan kesetaraan dalam berbagai bidang (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll) tidaklah mudah untuk didapatkan. Pembangunan berkelanjutan terus digencarkan guna memudahkan masyarakat mendapatkan kesetaraan termasuk pemenuhan akan hak-haknya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal tersebut, tertera dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Upaya pembangunan berkelanjutan terutama dalam hal kesehatan tetap diupayakan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Supaya kondisi tersebut dapat terwujud diperlukan adanya upaya pemenuhan kesehatan secara komprehensif yang didukung oleh sumber daya kesehatan. Salah satu sumber daya di bidang kesehatan yang sangat strategis adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2015, Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDMK adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Sumber daya manusia berkualitas tinggi menurut Ndraha (1999) adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi, seperti : *intelligence*, *creativity*, dan *imagination*. Sumber daya manusia kesehatan yang unggul mampu meningkatkan prestasi dan produktifitas kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pasal 13 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara

merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dilakukan dengan menggunakan perencanaan kebutuhan yang dilakukan secara berjenjang. Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dimulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, hingga pemerintah nasional.

Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan ditingkat Provinsi adalah proses perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan menurut jenis, jumlah, dan kualifikasi yang dilakukan dalam lingkup provinsi. Provinsi Jawa Timur memiliki 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota dengan masing-masing fasilitas kesehatan, 5 (lima) Rumah Sakit Provinsi, dan 13 (tiga belas) UPT. Setiap wilayah di Provinsi Jawa Timur harus membuat dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan.

Diharapkan melalui penyusunan dokumen perencanaan SDM Kesehatan di Provinsi Jawa Timur ini dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan SDM Kesehatan yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur serta, selain itu dapat melakukan perencanaan dan tindak lanjut terkait kesenjangan yang terjadi.

## **1.2 Tujuan Magang**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Mempelajari proses penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Mempelajari gambaran umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Mempelajari gambaran umum bidang sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
3. Mempelajari gambaran umum seksi sumber daya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
4. Mempelajari dan membuat bagan alir (*flowchart*) proses perencanaan kebutuhan di tingkat Provinsi Jawa Timur
5. Menganalisis proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
6. Menganalisis proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan konsep perencanaan.

7. Menganalisis proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan teori manajemen sumber daya manusia menurut Jackson dan Schuler
8. Menganalisis kesesuaian proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan teori manajemen sumber daya manusia menurut Jackson dan Schuler
9. Menganalisis hambatan yang terjadi selama proses penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

### **1.3 Manfaat Magang**

#### **1.3.1 Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**

1. Mendapat masukan berupa saran maupun rekomendasi dari laporan magang yang dibuat untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan) berkaitan dengan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Provinsi Jawa Timur
2. Mendapatkan bantuan sumber daya untuk membantu pelaksanaan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

#### **1.3.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga**

Meningkatkan keterampilan mahasiswa sehingga dapat menghasilkan lulusan yang mampu berdaya saing dan mampu menyelesaikan permasalahan di bidang kesehatan dengan menerapkan ilmu yang telah didapatkan.

#### **1.3.3 Bagi Mahasiswa**

1. Mendapatkan gambaran umum kondisi nyata dunia kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dengan kondisi di lapangan.
3. Menambah pengalaman kerja mahasiswa di bidang administrasi dan manajemen di tempat magang (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur).
4. Meningkatkan keterampilan mahasiswa di bidang administrasi dan manajemen di tempat magang (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan serta tugas pembantuan.

#### 2.2 Perencanaan

##### 2.2.1 Definisi Perencanaan

Terry (2010: 9) berpendapat bahwa fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer (Terry & Rue, 2010: 82). Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

##### 2.2.2 Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Menurut Schuler

Menurut Schuler et al (1992:55), perencanaan memiliki dua hubungan penting dengan lingkungan organisasi, yaitu hubungan dengan strategi organisasional dan budaya organisasional. Perencanaan SDM sangat erat kaitannya dengan strategi organisasional. Dengan mengkaitkan perencanaan SDM ke dalam tahapan perumusan di dalam implementasi strategi, organisasi dapat meningkatkan kesempatan memiliki *the right people at the right place and time*. Hasil dari integrasi ini secara substansial memiliki arti penting dari kepentingan organisasi. Sementara itu budaya organisasi (*organizational culture*) merefleksikan asumsi organisasi dalam mengelola SDM. Oleh karena, itu budaya organisasional mempengaruhi bagaimana kegiatan MSDM dilakukan. Kecenderungan yang tampak berkembang menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dari asumsi tradisional berubah menjadi asumsi terbaru dalam budaya organisasional

ini. Contoh dominan budaya organisasi tradisional misalnya ada suatu anggapan bahwa pekerjaan termotivasi secara tertutup (eksklusi) oleh kepentingan pribadi, pekerja butuh dikendalikan, pekerja cenderung menghindari pekerjaan dan seterusnya. Sedangkan budaya organisasi terbaru menunjukkan nilai dominan yang beranggapan bahwa para pekerja memiliki ketertarikan dengan pekerjaan, pekerja mampu berperilaku sesuai dengan motivasinya, dan adanya pengakuan bahwa pekerja adalah aset organisasi. Tahapan dalam proses perencanaan SDM yang meliputi:

1. Pengumpulan, analisis, dan peramalan data dalam rangka mengembangkan perkiraan pasokan SDM (dan membuat sistem informasi SDM); b. Pengumpulan, analisis, dan peramalan data dalam rangka mengembangkan permintaan SDM (dan menambahkannya ke dalam sistem informasi SDM).
2. Menetapkan tujuan dan kebijakan SDM dan mendapatkan persetujuan dan dukungan dan manajemen puncak
3. Merencanakan dan mengimplementasikan rencana dan program tindakan dalam berbagai bidang kegiatan seperti rekrutmen, pelatihan dan promosi yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuan SDM-nya. Sedangkan dalam tahap kedua dalam proses perencanaan SDM dilakukan persetujuan oleh manajemen puncak tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan dalam perencanaan SDM. Di samping itu, dalam tahapan ini juga ditentukan berbagai tujuan dan kebijakan yang berkaitan dengan SDM. Tahapan ketiga berupa pemrograman SDM yang meliputi sejumlah kegiatan pokok yang terdiri dari rekrutmen dan seleksi, penetapan, pemberhentian, remunerasi, pelatihan dan pengembangan penilaian identitas kinerja, serta sistem informasi SDM.

Perencanaan diakhiri dengan tahap keempat yaitu pengendalian atau kontrol dan evaluasi yang memusatkan perhatian pada efektifitas kebijakan SDM untuk akhirnya menjadi informasi baru bagi tahap pertama. Jika dicermati pada keempat tahapan tersebut, maka perencanaan SDM pada dasarnya merupakan kegiatan kunci (*key activity*) dalam MSDM. Didalamnya khususnya pada

tahap ketiga, terdapat banyak kegiatan yang menjadi substansi MSDM. Oleh karena itu, perencanaan SDM menjadi sangat penting bagi organisasi.

Perencanaan yang baik akan menentukan tingkat kualitas MSDM. Karena memiliki pengaruh yang kuat bagi keberhasilan organisasi, perencanaan SDM harus dilakukan secara efektif. Kegagalan organisasi dalam membuat perencanaan SDM umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan manajemen dalam memenuhi harapan yang tidak realitas. Demikian juga dengan penggunaai metode yang tidak tepat yang membuahkan hasil perencanaan menjadi tidak akurat dan *incompatible* dengan keseluruhan sisten SDM yang ada dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut sangat kritis sifatnya. Organisasi, memanfaatkan perencanaan SDM sedemikian rupa sehingga memungkinkannya dapat memenuhi prasyarat pemkerjaan dimasa mendatang. Keberhasilan perencanaan SDM mensyaratkan kerjasama antara departemen dengan manajer operasi lainnya dalam organisasi

### **2.2.3 Tujuan Perencanaan**

Menurut Usman (2009 : 47-48) terdapat beberapa tujuan dari perencanaan, yaitu :

1. Standar pengawasan untuk mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya.
2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan.
3. Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya) baik kualifikasi maupun kuantitasnya.
4. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan.
5. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan.
6. Mendeteksi hambatan kesulitan yang akan ditemui.
7. Mengarahkan pada pencapaian tujuan.

## **2.3 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan**

### **2.3.1 Definisi Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan proses sistematis dalam upaya menetapkan jumlah, jenis, dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi suatu wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

### 2.3.2 Tujuan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan, pemerintah daerah provinsi bertugas untuk :

1. Merekapitulasi hasil perencanaan kebutuhan SDM fasilitas kesehatan di pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota;
2. Menyusun kebutuhan SDM Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan status ijin baru dan peningkatan klasifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah daerah provinsi;
3. Menyusun perencanaan proyeksi kebutuhan SDM jangka menengah 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun.

### 2.3.3 Konsep Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seperti konsep perencanaan pada umumnya, perencanaan kebutuhan SDM merupakan penetapan langkah-langkah sebagai jawaban atas 6 (enam) buah pertanyaan yang dikenal sebagai 5W + 1 H, yaitu :

1.	Tindakan apa yang harus dikerjakan	<i>(WHAT)</i>
2.	Apakah sebabnya tindakan itu dikerjakan	<i>(WHY)</i>
3.	Dimanakah tindakan itu akan dilakukan	<i>(WHERE)</i>
4.	Bilamana tindakan itu dikerjakan	<i>(WHEN)</i>
5.	Siapa yang mengerjakan tindakan itu	<i>(WHO)</i>
6.	Bagaimana pelaksanaannya	<i>(HOW)</i>

Mondy dan Noe (2005) mendefinisikan Perencanaan SDM sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumberdaya manusia untuk memastikan bahwa jenis, jumlah dan kualitas dengan ketrampilan yang tepat, akan bersedia pada saat mereka dibutuhkan. George Milkovich dan Paul C. Nystrom (Dale Yoder, 1981) mendefinisikan bahwa perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara otomatis lebih bermanfaat

Adanya penyusunan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan bertujuan untuk memberikan acuan bagi setiap satuan kerja dari tingkat institusi, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dalam melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Perencanaan kebutuhan SDM dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan pembangunan kesehatan, baik lokal, nasional, maupun global, dan memantapkan komitmen dengan unsure terkait lainnya. Di era desentralisasi bidang kesehatan, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk merekrut SDM di daerah masing-masing sebagai pegawai pemerintah daerah.



Konsekuensinya, daerah harus memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan kebutuhan SDM, baik di pemerintah daerah provinsi maupun di pemerintah kabupaten/kota.

#### **2.3.4 Metode Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Metode perencanaan SDM dikelompokkan sebagai berikut:

A. Metode berdasarkan Institusi, yang digunakan adalah:

- 1) Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK Kes);
- 2) Standar Ketenagaan Minimal

B. Metode Berdasarkan Wilayah

### 2.3.5 Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan, terdapat 7 (tujuh) tahap penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Tingkat Provinsi, sebagai berikut :

1. Sosialisasi kebijakan perencanaan kebutuhan SDM

Sasaran sosialisasi adalah para pemangku kepentingan dalam perencanaan kebutuhan SDM. Tujuan sosialisasi untuk kesamaan pemahaman terhadap kebijakan perencanaan kebutuhan SDM dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan bermutu.

2. Pelaksanaan Advokasi Pemangku Kepentingan

Sasaran advokasi adalah para pemangku kepentingan dalam perencanaan kebutuhan SDM. Keluaran pada tahap ini adalah adanya komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan terkait dengan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan perencanaan kebutuhan SDM yang melibatkan lintas sektor dan lintas program tingkat provinsi.

3. Pembentukan Tim Perencanaan Kebutuhan SDM Tingkat Provinsi

Tim perencanaan SDM tingkat provinsi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Pembentukannya ditunjukkan untuk menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDM tingkat provinsi dan merumuskan usulan rekomendasi kebijakan untuk penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Tim perencanaan SDM tingkat provinsi terdiri dari pemangku kepentingan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.

a. Tim Pengarah

1) Susunan Tim Pengarah

Tim pengarah terdiri atas para pemangku kepentingan pada tingkat pengambil kebijakan, berasal dari Asisten Daerah yang membidangi organisasi, Kelembagaan dan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi.

2) Tugas dan Fungsi Tim Pengarah

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan SDM dalam mendukung pembangunan kesehatan;

- b. Memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen;
- c. Memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat provinsi;
- d. Memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
- e. Memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat provinsi.

b. Tim Pelaksana

1) Susunan Organisasi Tim Pelaksana

Tim pelaksana terdiri atas para pemangku kepentingan pada tingkat penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat provinsi, berasal dari Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi, Fasilitas Kesehatan Pemerintah Provinsi dan Fasilitas Kesehatan Vertikal.

2) Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi dari Tim Pelaksana sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi institusi kesehatan dan UPTD kesehatan serta institusi kesehatan vertikal di wilayah provinsi yang harus menghitung kebutuhan SDMK;
- b. Mengoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan SDMK dari masing-masing UPTD Kesehatan dan institusi kesehatan vertikal di wilayah provinsi serta rekapitulasi data dari kabupaten/kota di wilayahnya;
- c. Memfasilitasi/ pembinaan UPTD Kesehatan dan institusi kesehatan vertikal di wilayah provinsi serta

kabupaten/kota dalam menghitung kebutuhan SDM;K;

- d. Menyusun dokumen yang merupakan kompilasi dari provinsi dan UPTD kesehatan serta institusi kesehatan di wilayah provinsi;
- e. Menyusun rekapitulasi ketersediaan dan kebutuhan SDM pemerintah daerah provinsi;
- f. Menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
- g. Memroses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan SDM tingkat provinsi;
- h. Melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan SDM kepada gubernur melalui sekretaris daaerah untuk bahan pertimbangan dalam manajemen SDM di provinsi dan ditembuskan ke Kementerian Kesehatan.

#### 1) Kapasitas Tim Pelaksana

Tim pelaksana merupakan bagian dari Tim Perencanaan Kebutuhan SDM tingkat pemerintah daerah provinsi yang harus memiliki kemampuan untuk menghitung rencana kebutuhan SDM di wilayahnya. Tim tersebut juga harus mampu menjadi fasilitator bagi Fasilitas Kesehatan yang menjadi tanggung jawab baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten di wilayahnya. Untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Tim Pelaksana perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan atau kegiatan lainnya.

#### 4. Melakukan Fasilitas Perhitungan Kebutuhan SDM

Tim perencanaan kebutuhan SDM memberikan bantuan teknis, fasilitasi, dan asistensi kepada yang membutuhkan. Dalam melaksanakan bantuan teknis dan fasilitasi, maka diberikan kemampuan untuk menghitung kebutuhan SDM dengan

menggunakan beberapa metode perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yakni:

- a. ABK Kesehatan, untuk perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Standar Ketenagaan Minimal, untuk perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan baru, peningkatan klasifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah yang tidak diminati.
- c. Metode Rasio terhadap Penduduk untuk menyusun proyeksi kebutuhan SDM Kesehatan jangka menengah 5 atau 10 tahun, serta menggambarkan peta distribusi ketersediaan dan kebutuhan SDM Kesehatan di wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota se provinsi.

Keluaran pada tahapan ini meliputi :

- a. Data kebutuhan dan ketersediaan SDM Kesehatan menurut jenis dan jumlahnya per institusi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan provinsi.
  - b. Data kebutuhan dan ketersediaan SDM Kesehatan menurut jenis dan jumlahnya per institusi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan provinsi baik yang baru maupun peningkatan klasifikasi atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah yang tidak diminati.
  - c. Peta rasio ketersediaan penyebaran (distribusi) SDM Kesehatan menurut jenis dan jumlahnya wilayah provinsi.
5. Kompilasi Hasil Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan

Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan data dan informasi dari fasilitas kesehatan provinsi dan fasilitas pelayanan kesehatan vertikal. Adapun data dan informasi yang harus dikumpulkan paling sedikit:

- a. Data dan informasi hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan SDM kesehatan provinsi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan vertikal di wilayah provinsi;
- b. Data dan informasi umum wilayah provinsi yang meliputi data demografi dan geografi;
- c. Data dan informasi komposisi anggaran bersumber APBD untuk belanja aparatur dan publik;
- d. Data dan informasi fasilitas kesehatan provinsi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan vertikal di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya;
- e. Data dan informasi komposisi SDM (jenis, jumlah, dan kualifikasi pendidikan) yang ada di fasilitas kesehatan provinsi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan vertikal di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya; dan
- f. Data dan informasi hasil rekapitulasi ketersediaan dan kebutuhan dari hasil perhitungan kebutuhan SDM kabupaten/kota di wilayahnya.

Keluaran pada tahapan ini adalah rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan SDM kabupaten/kota di wilayahnya.

## 6. Analisis Data dan Informasi

Dalam tahapan ini Tim Perencana SDM melakukan analisis terhadap data dan informasi yang sudah dikumpulkan dan direkapitulasi dikaitkan dengan kondisi dan potensi wilayah setempat. Untuk perumusan usulan rekomendasi analisisnya dikaitkan dengan kebijakan yang ada dan berpotensi digunakan sebagai dasar penataan dan manajemen SDM Kesehatan lebih lanjut. Hal-hal yang perlu dihasilkan dari proses analisis sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM yang bekerja di fasilitas kesehatan wilayah provinsi;

- b. Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM Kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan vertikal di wilayah provinsi;
  - c. Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM Kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah pada pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - d. Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi yang ijin baru atau untuk peningkatan klasifikasi;
  - e. Disparitas penyebaran (distribusi) SDM Kesehatan antar wilayah berdasarkan target rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk;
  - f. Rekomendasi penataan dan manajemen SDM Kesehatan untuk peningkatan upaya kesehatan yang komprehensif di provinsi.
7. Memasukan Data, Informasi, dan Hasil Analisis ke dalam Format Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan tingkat Provinsi

Data, informasi, dan hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, sebagai berikut :

1. Dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan tahunan, yang disusun setiap tahun sebagaimana tercantum dalam contoh 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan jangka menengah 5 atau 10 tahun sebagaimana tercantum dalam contoh 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yang telah disusun, kemudian dilaporkan oleh tim pelaksana perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kepada tim pengarah perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan untuk diberikan arahan/ rekomendasi.

### 2.3.6 Pendekatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dilakukan dengan dua pendekatan:

- a. Perencanaan dari atas (*Top Down Planning*) yakni Pusat menetapkan kebijakan, menyusun pedoman, sosialisasi, pelatihan, dan lokakarya secara berjenjang. Dengan pendekatan ini maka diharapkan kebijakan penyusunan perencanaan kebutuhan SDM dapat terimplementasikan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. Perencanaan dari bawah (*Bottom Up Planning*), yakni Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dimulai dari institusi kesehatan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh suatu tim perencana yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemanfaatan hasil perencanaan kebutuhan SDM diadvokasikan kepada para pemangku kepentingan di tiap jenjang administrasi pemerintahan.



## BAB III

### METODE KEGIATAN

#### 3.1. Rancang Bangun Kegiatan Magang

Kegiatan magang adalah kegiatan yang bersifat observasional partisipatif di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Mahasiswa melakukan kegiatan observasi dan pengumpulan data sesuai dengan ruang lingkup kegiatan magang yakni mempelajari tugas pokok dan fungsi dari kegiatan yang dilakukan sesuai dengan program dalam Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

#### 3.2. Lokasi Kegiatan Magang

Lokasi kegiatan magang dilakukan di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

#### 3.3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang

Rincian waktu yang digunakan selama kegiatan magang berlangsung adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang**

No.	Kegiatan	Januari				Februari		Maret	
		I	II	III	IV	I	II-IV	I	II
1.	Melakukan pengenalan terhadap lingkungan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
2.	Mempelajari struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
3.	Membantu beberapa tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
4.	Mempelajari program perencanaan kebutuhan SDM di Provinsi Jawa Timur								
5.	Melakukan observasi dan diskusi/ wawancara mendalam kepada pihak terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi								

No.	Kegiatan	Januari			Februari		Maret	
6.	Turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan magang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur							
7.	Menyusun Laporan Magang							
8.	Seminar hasil dan laporan magang							

Pelaksanaan magang pada minggu pertama dan kedua dilakukan kegiatan pengenalan terhadap lingkungan, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bidang Sumber Daya Kesehatan, dan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Diskusi dan wawancara dilakukan pada minggu ketiga dengan mempelajari literatur serta pedoman dan perundang-undangan yang diterapkan oleh organisasi. Selanjutnya, kegiatan penyusunan laporan juga dilakukan.

Partisipasi aktif dilakukan mulai dari minggu pertama menyesuaikan tugas yang diberikan oleh Seksi Sumber Daya Kesehatan.

### 3.4. Metode Pelaksanaan Magang

Metode yang digunakan dalam kegiatan magang antara lain:

1. Kajian literatur yang dilakukan dengan mengkaji beberapa literatur (buku teks dan jurnal ilmiah), kebijakan, pedoman, paparan, hingga laporan.
2. Diskusi atau wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yakni penanggung jawab program perencanaan kebutuhan SDM Provinsi Jawa Timur
3. Partisipasi aktif yakni melakukan aktivitas sesuai dengan tupoksi untuk melatih kemampuan dan keterampilan dalam bekerja dengan membantu mengerjakan tugas selama pelaksanaan magang berlangsung.
4. Observasi atau pengamatan secara langsung di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

### 3.5. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam menunjang kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Profil, gambaran umum, struktur organisasi, dan tujuan pokok dan fungsi yang berlaku di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Kebijakan yang berlaku mengenai kegiatan perencanaan kebutuhan SDM

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan sebagai data untuk menganalisis kegiatan pengawasan di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan :

#### 1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui diskusi atau wawancara dengan staff dan Kasubag SDM Dinas

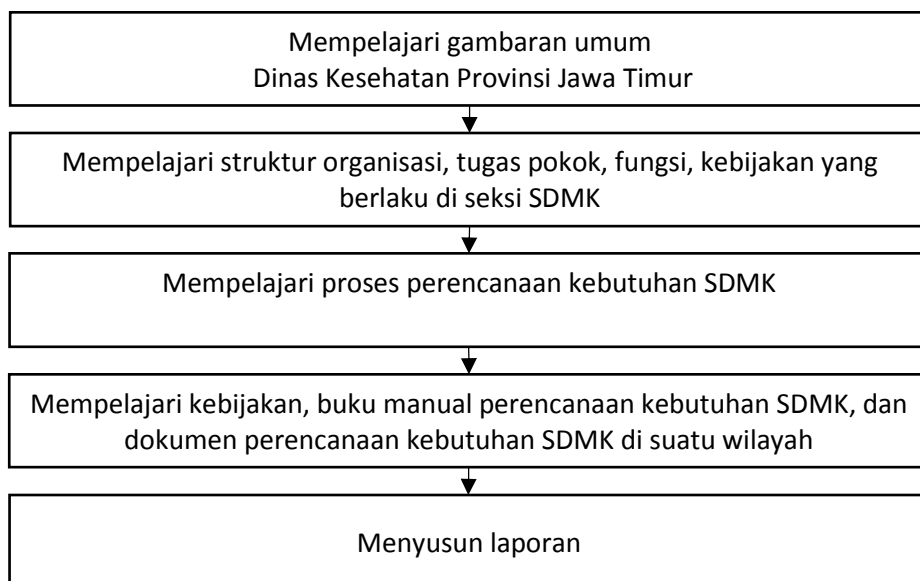
#### 2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melihat kebijakan, pedoman, bahan paparan mengenai program pengawasan yang ada di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

### 3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dibandingkan dengan kajian kebijakan yang ada dan terkait.

### 3.8. Kerangka Operasional



Gambar1. Kerangka Operasional

### **3.9. Output Kegiatan Magang**

Kegiatan magang yang dilakukan mahasiswa diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan terutama pada kegiatan Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi. Usulan rekomendasi terkait diharapkan mampu dihasilkan saat pelaksanaan magang.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**

Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan serta tugas pembantuan.

Dinas dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana disebutkan di atas memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **4.1.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**

###### **a. Visi**

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi : "Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat".

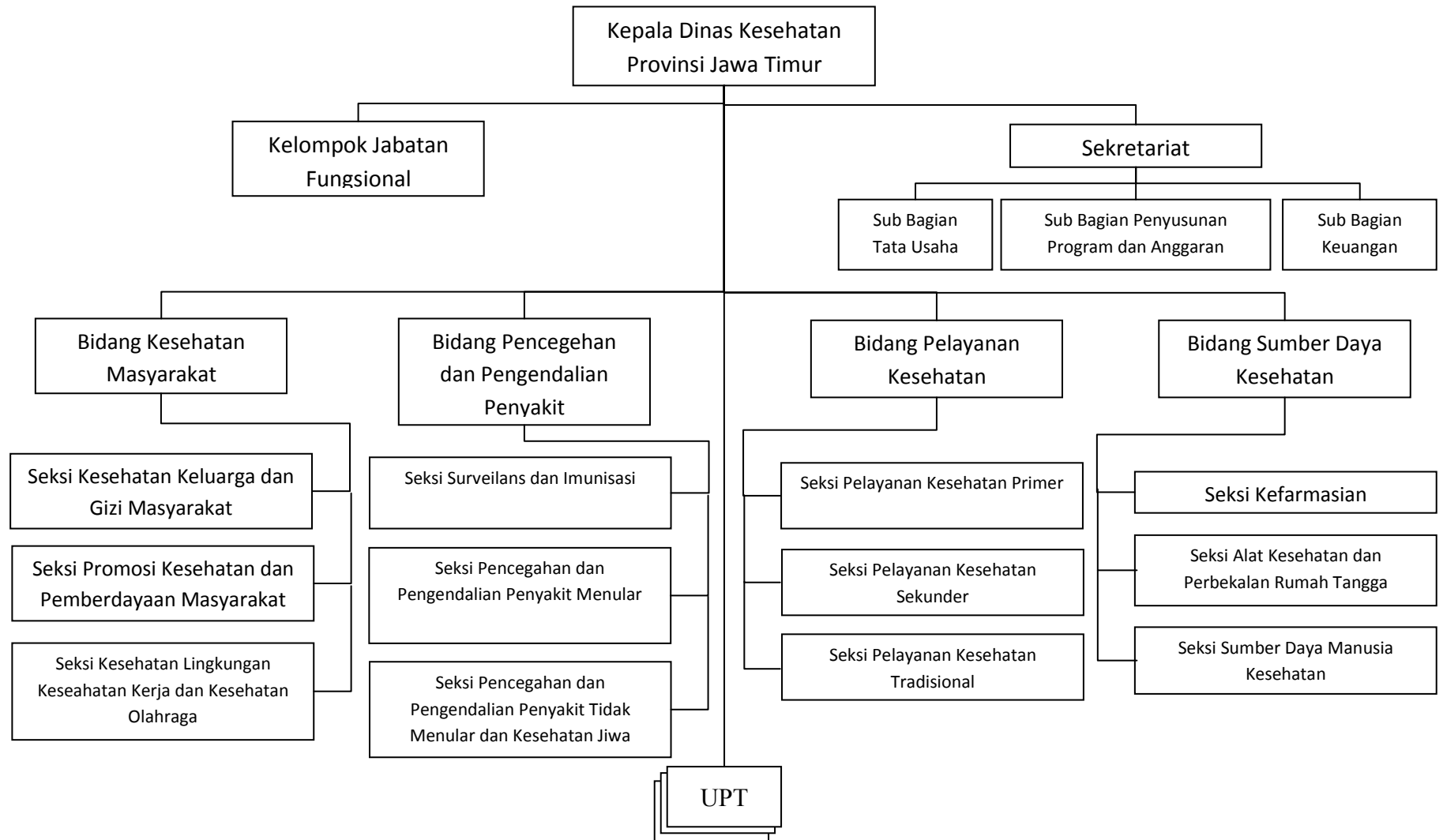
###### **b. Misi**

Dalam mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat Jawa Timur mandiri untuk hidup sehat, maka misi yang dilakukan adalah :

1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
2. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
3. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.
4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan.
5. Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan.

### 4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang terdapat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur digambarkan sebagai berikut :



#### **4.2 Gambaran Umum Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan. Bidang sumber daya kesehatan untuk dapat menjalankan tugasnya memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

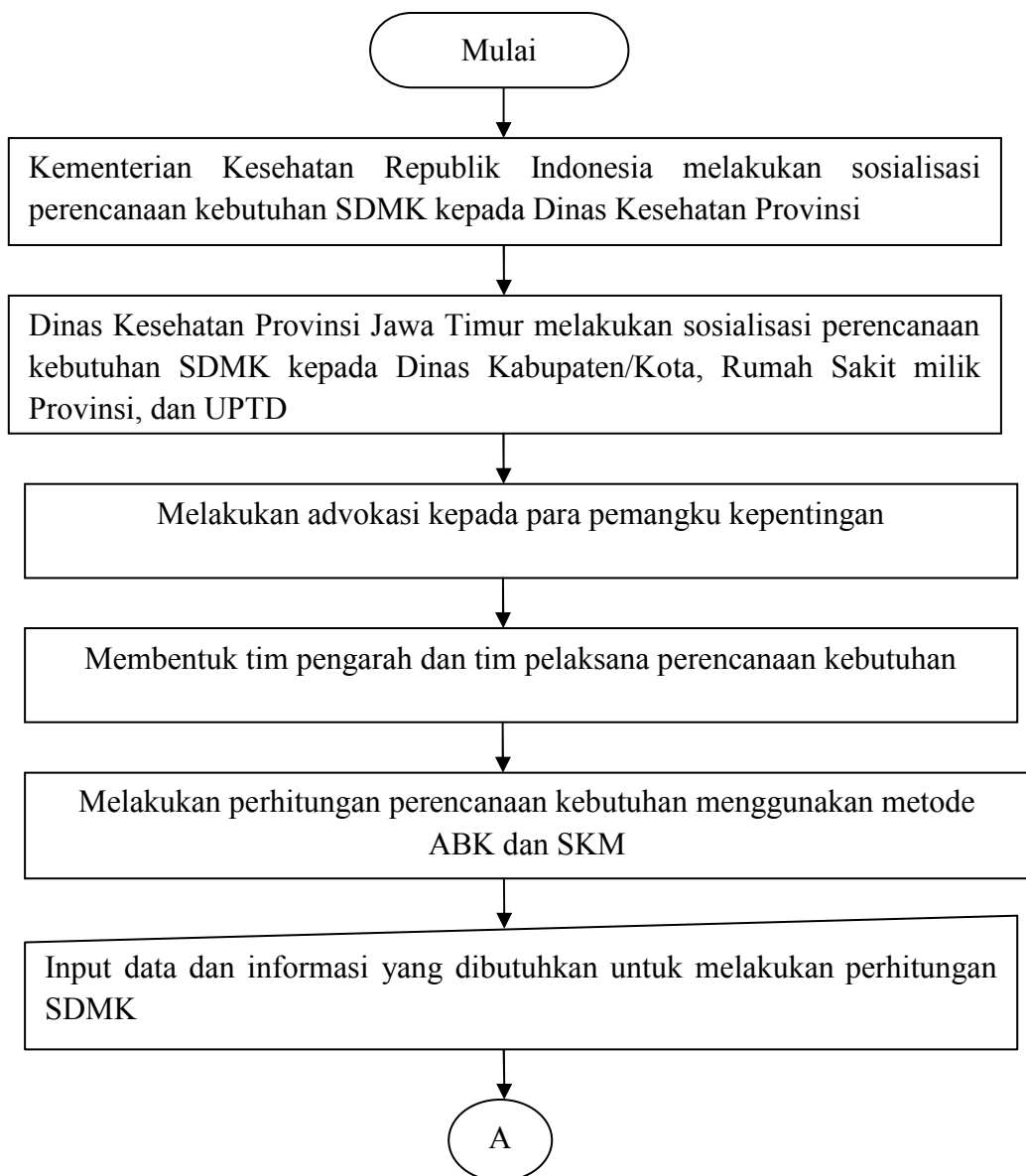
#### **4.3 Gambaran Umum Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Seksi sumber daya manusia kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas, yaitu :

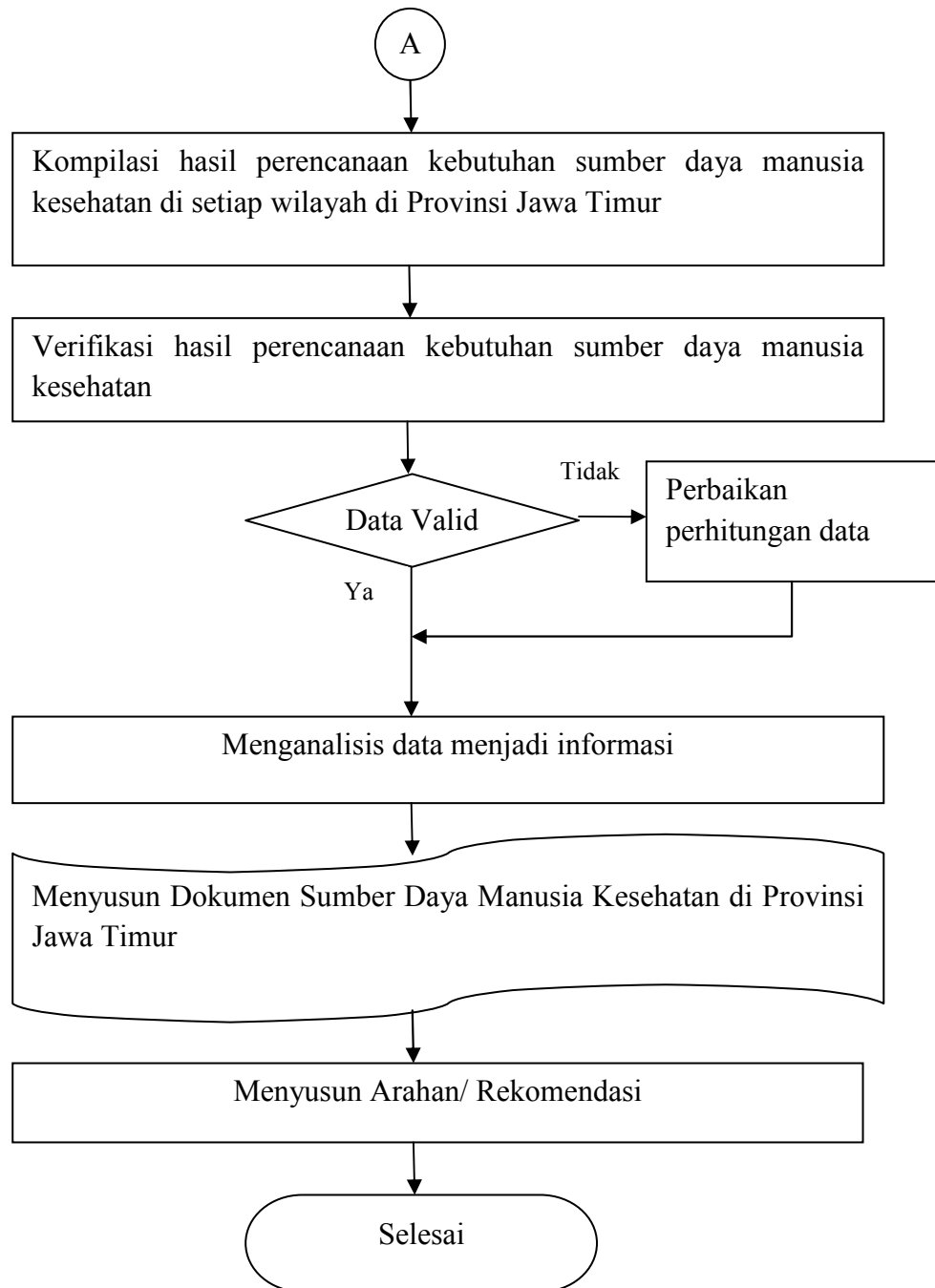
- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- d. Menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;

- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;

#### 4.4 *Flowchart* Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur







Gambar 4.4 Bagan alir (*flowchart*) perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Bagan 4.4 merupakan bagan alir (*flowchart*) tahapan pelaksanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Bagan alir (*flowchart*) yang telah dibuat oleh mahasiswa magang ini diharapkan dapat digunakan untuk memudahkan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **4.5 Proses Perencanaan Kebutuhan SDM Tingkat Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab program perencanaan kebutuhan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur diperoleh langkah penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM sebagai berikut :

##### **1. Sosialisasi**

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku wakil Presiden memberikan sosialisasi terkait perencanaan sumber daya manusia kesehatan kepada 34 Provinsi di Indonesia. Sosialisasi perencanaan sumber daya manusia kesehatan tingkat provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sasaran dari sosialisasi ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur, dan UPT Provinsi Jawa Timur. Pembekalan diberikan kepada sasaran untuk menyamakan pemahaman terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM. Setelah dilakukan sosialisasi, sasaran diajak untuk berlatih membuat perencanaan kebutuhan SDM dengan menggunakan web resmi atau secara *online*. Diharapkan melalui proses sosialisasi dan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM dapat berlangsung diskusi terarah, sehingga pihak pemerintah daerah provinsi mendapat umpan balik yang dapat memperbaiki proses penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM di Provinsi Jawa Timur.

##### **2. Advokasi**

Tim Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan advokasi kepada Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Fasilitas Kesehatan Pemerintah Provinsi, dan Fasilitas Kesehatan vertikal. Advokasi dilakukan untuk membangun komitmen yang kuat antar lintas sektor dan lintas program dalam menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan secara adil dan merata.

### 3. Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana

Tim pengarah dan pelaksana penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK terdiri dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Dinas Kesehatan Provinsi, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Fasilitas Kesehatan Pemerintah Provinsi, dan Fasilitas Kesehatan vertikal. Tugas tim pengarah secara garis besar adalah memberi arahan terkait kebijakan dan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK. Sedangkan tim pelaksana memiliki kapasitas untuk mampu menghitung rencana kebutuhan SDMK di wilayahnya dan menjadi fasilitator bagi fasilitas kesehatan yang menadi tanggung jawabnya.

### 4. Perhitungan Perencanaan Kebutuhan SDMK

Penyusunan dilakukan secara *online* dengan melakukan *input* data-data perencanaan kebutuhan SDMK sesuai dengan metode perencanaan kebutuhan SDMK yang digunakan. Terdapat beberapa metode yang digunakan oleh institusi seperti, metode Analisis Beban Kerja (ABK) dan metode Standar Ketenagaan Minimal (SKM). Berikut tahap perhitungan perencanaan kebutuhan SDMK di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menggunakan metode ABK dan SKM :

#### A. Metode ABK Kesehatan

- a. Proses Login pada Aplikasi Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan (Metode ABK) online versi 3.4 melalui web <http://renbut.kemendes.go.id/> dengan mengisi “nama pengguna” dan “password” yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan.
- b. Langkah 1 menetapkan jabatan yang dibutuhkan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Data dan informasi terkait jabatan yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui :
  - a) Peraturan Daerah Tingkat Provinsi tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
  - b) Data Hasil Analisis Jabatan (peta jabatan dan informasi jabatan) dari SKPD masing-masing.
  - c) Pedoman teknis SPO (Standar Prosedur Operasional) setiap tugas pokok dan Fungsi Jabatan.

- c. Langkah 2 menetapkan Waktu Kerja Tersedia (WKT) sebesar 1200 jam per tahun atau 7200 menit per tahun baik yang hanya bekerja 5 hari kerja atau 6 hari kerja per minggu.

**Tabel 4.1 Menetapkan Waktu Kerja Tersedia (WKT) dalam 1 tahun**

	Kode	Komponen	Keterangan	Rumus	Jumlah	Satuan
	A	B	C	D	E	F
1.	A	Hari kerja	5 hr kerja/mg	52 (mg)	260	hr/th
2.			6 hr kerja/mg	52 (mg)	312	hr/th
3.	B	Cuti pegawai	Peraturan kepegawaian		12	hr/th
4.	C	Libur Nasional	Dalam 1 th (kalender)		19	hr/th
5.	D	Mengikuti pelatihan	Rata-rata dalam 1 tahun		5	hr/th
6.	E	Absen (sakit,dll)	Rata-rata dalam 1 tahun		12	hr/th
7.	F	Waktu kerja (dalam 1 minggu)	Kepres No. 68/ 1995		37.5	Jam/mg
8.	G	Jam Kerja Efektif (JKE)	Permen PAN-RB 26/2011	75% x 37.5 Jam	28.125	Jam/mg
9.	WK	Waktu kerja (dalam 1 hari)	5 hr kerja/mg	E8 / 5	5.625	Jam/hr
10.			6 hr kerja/mg	E8 / 6	4.688	Jam/hr
11.	WKT	Waktu kerja tersedia (hari)	5 hr kerja/mg	E1-(E3+E4+E5+E6)	212	hr/th
12.			6 hr kerja/mg	E2-(E3+E4+E5+E6)	264	hr/th
13.		Waktu kerja tersedia (jam)	5 hr kerja/mg	E1-(E3+E4+E5+E6)XE9	1192	Jam/th
14.			6 hr kerja/mg	E2-(E3+E4+E5+E6)XE10	1237	Jam/th
<b>Waktu Kerja Tersedia (WKT)....dibulatkan (dalam jam)</b>					<b>1200</b>	<b>Jam/th</b>
<b>Waktu Kerja Tersedia (WKT)....dibulatkan (dalam menit)</b>					<b>72000</b>	<b>Mnt/th</b>

- d. Langkah 3 *input* tugas pokok, tugas penunjang, uraian tugas, dan norma waktu. Norma waktu adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seorang SDM yang terdidik, terampil, terlatih, dan berdedikasi untuk melaksanakan suatu kegiatan secara normal sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

**Tabel 4.2 Menetapkan Komponen Beban kerja dan Norma Waktu  
(contoh : Tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Dinas Kesehatan Provinsi)**

No.	Jenis Tugas	Komponen beban kerja (kegiatan)	Norma Waktu	Satuan
1.	Tugas Pokok	Menyusun kebijakan, melaksanakan, dan memantau pengendalian mutu pendidikan akreditasi	480	Mnt/hr
		Menyusun kebijakan, melaksanakan, dan memantau tugas belajar tenaga kesehatan	480	Mnt/hr
		Menyusun kebijakan, melaksanakan, dan memantau program pendidikan Dokter Intenship Indonesia	480	Mnt/hr
2.	Tugas Penunjang	Mengajar/ melatih di bidangnya	2	Jam/bulan
		Mengikuti seminar/ lokakarya di bidangnya	2	Jam/bulan

- e. Langkah 4 menghitung Standar Beban Kerja (SBK) dengan cara membagi waktu kerja tersedia (WKT) dengan norma waktu per kegiatan pokok. Standar Beban Kerja (SBK) merupakan volume/ kuantitas pekerjaan selama satu tahun untuk setiap jenis SDM.

**Tabel 4.3 Contoh : Menetapkan Standar Beban Kerja (SBK) di Seksi Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**

No.	Jenis Tugas	Komponen beban kerja (kegiatan)	Norma Waktu	Satuan	WKT (menit)	SBK (norma waktu/WKT)
1.	Tugas Pokok	Menyusun kebijakan, melaksanakan, dan memantau pengendalian mutu pendidikan akreditasi	480	Mnt/hr	72000	150

**Tabel 4.3 Contoh : Menetapkan Standar Beban Kerja (SBK) di Seksi Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**

No.	Jenis Tugas	Komponen beban kerja (kegiatan)	Norma Waktu	Satuan	WKT (menit)	SBK (norma waktu/WKT)
		Menyusun kebijakan, melaksanakan, dan memantau tugas belajar tenaga kesehatan	480	Mnt/hr	72000	150
		Menyusun kebijakan, melaksanakan, dan memantau program pendidikan Dokter Intenship Indonesia	480	Mnt/hr	72000	150

- f. Langkah 5 menghitung Standar Tugas Penunjang (STP) dan Faktor Tugas Penunjang (FTP). Tugas penunjang adalah tugas untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tugas pokok dan fungsinya yang dilakukan oleh seluruh jenis SDM. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor penunjang adalah proporsi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan setiap kegiatan per satuan waktu.

**Tabel 4.4 Contoh : Menghitung STP dan FTP Seksi Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**

No.	Uraian Tugas	Norma Waktu	Satuan	Waktu Kegiatan (mnt/th)	WKT	FTP %
1.	Mengajar/melatih sesuai bidangnya	2	Jam/bulan	1440	72000	2.00
2.	Mengikuti seminar/lokakarya di bidangnya	2	Jam/Bulan	1440	72000	2.00
TOTAL Faktor Tugas Penunjang (FTP)						4.00
Standar Tugas Penunjang				$= (1 / (1 - \text{FTP} / 100))$		1.04

- g. Langkah 6 menghitung kebutuhan SDMK berdasarkan uraian tugas pokok dan tugas penunjang. Hasil kebutuhan SDMK diperoleh dari jumlah kebutuhan tenaga tugas pokok dikalikan dengan standar tugas penunjang yang telah dilakukan pada tahap 5. Hasil dari perhitungan akan menunjukkan jumlah PNS/Tenaga Tetap, Jumlah Seharusnya Berdasarkan ABK, dan Keterangan dari tenaga tersebut lebih atau masih kurang.

### B. Metode Standar Ketenagaan Minimal

Pedoman yang digunakan untuk melakukan metode standar ketenagaan minimal di puskesmas berupa Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Berikut merupakan contoh standar ketenagaan puskesmas sesuai Permenkes No. 75 tahun 2014 :

**Tabel 4.5 Contoh : Standar Ketenagaan Minimal Tenaga Kesmas di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 2014**

No.	Jenis Tenaga	Puskesmas Kawasan Perkotaan		Puskesmas Kawasan Pedesaan		Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil	
		Non RI	RI	Non RI	RI	Non RI	RI
1.	Tenaga Kesmas	2	2	1	1	1	1

(Sumber : Lampiran Permenkes No. 75 Tahun 2014)

Untuk standar ketenagaan minimal rumah sakit diatur dalam Permenkes No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Berikut merupakan contoh standar ketenagaan rumah sakit sesuai Permenkes No. 56 tahun 2014.

**Tabel 4.6 Contoh : Standar Ketenagaan Minimal Dokter Umum di Rumah Sakit Kelas A,B,C,dan D berdasarkan Permenkes No. 56 tahun 2014**

No.	SDMK	Standar SDM (Kelas)			
		A	B	C	D
1.	Dokter Umum	18	12	9	4

(Sumber : Lampiran Permenkes No. 56 Tahun 2014)

Terkait peraturan yang mendukung standar minimal ketenagaan bagi Dinas Kesehatan Provinsi disesuaikan dengan peraturan yang telah dibuat. Perhitungan Standar Ketenagaan Minimal (SKM) juga diakses melalui web <http://renbut.kemendes.go.id/> dengan memilih metode standar ketenagaan

minimal yang tertera pada layar. Langkah perhitungan diawali dengan mengisi beberapa menu di entry seperti tahun dan provinsi. Setelah itu akan muncul hasil Perencanaan Kesehatan yang menunjukkan jumlah sumber daya kesehatan yang ada, standar yang telah ditetapkan dan kesenjangan jumlah sumber daya manusia kesehatan.

#### **5. Kompilasi Hasil Perhitungan Kebutuhan SDM**

Setelah melakukan proses perencanaan kebutuhan SDM di tingkat provinsi, tahap selanjutnya adalah pengumpulan data dan informasi *online* tiap-tiap daerah di Provinsi Jawa Timur, kemudian data tersebut direkapitulasi dalam bentuk *offline (excel)*. Hasil rekapitulasi data akan dituangkan dalam bentuk buku dokumen perencanaan kebutuhan SDM yang wajib dibuat oleh 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota, 5 (lima) rumah sakit provinsi, dan 13 (tiga belas) rumah sakit UPT.

#### **6. Analisis Data dan Informasi**

Melakukan analisis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan dan direkapitulasi. Tim Pelaksana akan melakukan verifikasi data yang telah dikumpulkan. Melalui proses ini dapat diketahui kondisi SDM secara nyata di suatu wilayah. Apabila setelah dilakukan verifikasi data yang dihasilkan belum valid, maka tim pelaksana akan mengembalikan dokumen pada pihak yang bersangkutan untuk diperbaharui hingga data benar-benar valid.

#### **7. Memasukkan Data, Informasi, dan Hasil Analisis ke dalam Format Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Tingkat Provinsi**

Setelah data yang dianalisis sudah valid, maka selanjutnya tim pelaksana akan memasukkan data, informasi, dan hasil analisis dalam rekapitulasi perencanaan kebutuhan SDM Se-Provinsi Jawa Timur. Setelah tahap penyusunan selesai dokumen perencanaan kebutuhan SDM tersebut akan dikirimkan pada tim pengarah perencanaan kebutuhan SDM untuk selanjutnya diberikan arahan/ rekomendasi.

### **4.6 Proses Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Konsep Perencanaan**

#### **a. Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (*What*)**

Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2015 merupakan suatu proses sistematis



dalam upaya menetapkan jumlah, jenis, dan kualifikasi SDM Kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi suatu wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dapat dilakukan ditingkat institusi, kabupaten/kota hingga provinsi. Perencanaan Sumber Daya Manusia di tingkat Provinsi Jawa Timur mengacu pada kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di setiap wilayahnya. Perencanaan sumber daya manusia kesehatan dilakukan dengan perhitungan menggunakan metode ABK dan SKM dengan harapan dapat dilakukan pemerataan sumber daya manusia kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

**b. Pelaksana Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di tingkat provinsi (*Who*)**

Tim pengarah dan pelaksana perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan terdiri dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Dinas Kesehatan Provinsi, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Fasilitas Kesehatan Pemerintah Provinsi, dan Fasilitas Kesehatan vertikal.

**c. Waktu Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (*When*)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2015 telah diatur *time line* penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan tingkat provinsi yang dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Rentang Waktu Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan di Tingkat Provinsi Jawa Timur**

	Kegiatan	Juli	Agustus	September
1.	Persiapan penyusunan renbut			
2.	Sosialisasi kebijakan renbut			
3.	Pelaksanaan advokasi pemangku kepentingan			

**Tabel 4.7 Rentang Waktu Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan di Tingkat Provinsi Jawa Timur**

	Kegiatan	Juli	Agustus	September
4.	Pembentukan tim renbut SDM Kesehatan			
5.	Peningkatan kapasitas tim pelaksana			
6.	Melakukan fasilitasi perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan dan UPTD			
7.	Penyusunan renbut SDM Kesehatan			
8.	Kompilasi hasil perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan			
9.	Analisis data dan informasi			
10.	Menyusun dokumen renbut SDM Kesehatan di Provinsi			
11.	Tindak lanjut			

**d. Tempat Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (*Where*)**

Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kemudian, pihak Dinas Kesehatan Provinsi melakukan sosialisasi kepada dinas kesehatan kota yang membawahi puskesmas dan rumah sakit milik provinsi untuk melakukan perencanaan kebutuhan.

**e. Alasan Pelaksanaan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Why)**

Adanya perencanaan sumber daya manusia kesehatan di Provinsi Jawa Timur dapat memberikan gambaran terkait kondisi sumber daya manusia kesehatan yang ada di setiap wilayah Jawa Timur. Berikut manfaat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang dapat diperoleh unit organisasi maupun pegawai :

**A. Manfaat bagi institusi**

1. Bahan penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
2. Bahan penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
3. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
4. Bahan sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
5. Bahan penyusunan standar beban kerja, jabatan/kelembagaan;
6. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
7. Bahan perencanaan mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;
8. Bahan penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

**B. Manfaat bagi wilayah**

1. Bahan perencanaan distribusi;
2. Bahan perencanaan redistribusi (pemerataan);
3. Bahan penyesuaian kapasitas produksi;
4. Bahan pemenuhan kebutuhan SDM;
5. Bahan pemetaan kekuatan/potensi SDM antar wilayah;
6. Bahan evaluasi dan penetapan kebijakan pemerataan. Pemanfaatan, dan pengembangan SDM.

**f. Cara Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (How)**

Proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di tingkat Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Tahap perencanaan kebutuhan SDM**

No.	Tahap Perencanaan Kebutuhan	Keterangan
1.	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Kebutuhan SDM	Sosialisasi dilakukan kepada pihak-pihak terkait (fasilitas pelayanan kesehatan) untuk memudahkan pemahaman pengelola dalam menyusun perencanaan kebutuhan SDM di wilayahnya
2.	Pelaksanaan Advokasi Pemangku Kepentingan	Advokasi telah dilakukan untuk membangun komitmen yang kuat dalam proses penyusunan perencanaan kebutuhan SDM baik lintas sektor maupun lintas program
3.	Pembentukan Tim Perencanaan Kebutuhan SDM Tingkat Provinsi	Telah disusun tim pengarah dan tim pelaksana perencanaan kebutuhan SDM di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Dinas Kesehatan Provinsi, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Fasilitas Kesehatan Pemerintah Provinsi, dan Fasilitas Kesehatan vertikal
4.	Melakukan Fasilitas Perhitungan Kebutuhan SDM	Perhitungan perencanaan kebutuhan SDM dilakukan menggunakan metode ABK dan SKM

**Tabel 4.8 Tahap Perencanaan SDM**

<b>No.</b>	<b>Tahap Perencanaan Kebutuhan</b>	<b>Keterangan</b>
5.	Kompilasi Hasil Perhitungan Kebutuhan SDMK	Pengumpulan data dan informasi terkait perencanaan kebutuhan SDM pada masing-masing wilayah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Data dan informasi merupakan hasil rekapitulasi dari perhitungan yang telah dilakukan
6.	Analisis Data dan Informasi	Data dan informasi yang telah diolah akan dianalisis untuk melihat kesenjangan antara jumlah SDM sebenarnya dengan kebutuhan yang ada menggunakan metode ABK dan SKM
7.	Memasukan Data, Informasi, dan Hasil Analisis ke dalam Format Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Tingkat Provinsi	Data, Informasi, dan Hasil Analisis yang telah diverifikasi akan direkapitulasi oleh pihak perencanaan kebutuhan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya dituangkan dalam buku perencanaan kebutuhan SDM Provinsi Jawa Timur

#### **4.7 Proses Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Surabaya berdasarkan Teori Perencanaan Sumber Daya Manusia Menurut Jackson dan Schuler**

Berikut merupakan tahap atau proses perencanaan sumber daya manusia menurut Jackson dan Schuler (1990) :

##### **a. Pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diespektasikan bagi perencanaan masa depan**

Pengumpulan dan analisis data pada beberapa tahun sebelumnya dilakukan untuk mendapat informasi terkait permintaan dan persediaan sumber daya

manusia di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Informasi yang didapat berupa estimasi kebutuhan akan SDM yang diperlukan oleh organisasi serta estimasi jumlah tenaga kerja yang tersedia.

**b. Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia**

Tujuan umum dari perencanaan tenaga kesehatan adalah untuk mencukupi tenaga kesehatan di daerah masing-masing serta melakukan pemerataan terhadap tenaga kesehatan di suatu daerah. Selain itu, dapat dilakukan perbandingan antara perhitungan metode Analisis Beban Kerja (ABK) dan Standar Ketenagaan Minimal (SKM) terkait perencanaan sumber daya manusia. Diharapkan melalui penetapan tujuan tersebut dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

**c. Merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia**

Penyusunan alternatif program yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan perencanaan sumber daya manusia di Dinas Provinsi Jawa Timur dapat melalui metode yang akan dipilih sesuai kebutuhan.

a. Metode berdasarkan institusi yang digunakan adalah :

1. Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK Kes)
2. Standar Ketenagaan Minimal (SKM)

b. Metode berdasarkan wilayah

Metode yang digunakan adalah metode “Ratio Penduduk” yaitu Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk di Suatu Wilayah

**d. Mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan**

Tahap pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan menilai mulai dari tahap 1 hingga tahap 3 apa saja yang telah dilakukan dan apakah hal tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ada. Setelah itu meminta rekomendasi dari penanggung jawab program atau tim perencanaan sumber daya manusia untuk bisa dilakukan perbaikan sesuai arahan yang telah diberikan. Salah satu rekomendasi yang telah dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi adalah program Nusantara Sehat untuk menempatkan dokter/ tenaga kesehatan yang dibutuhkan di pulau-pulau terpencil.

#### 4.8 Kesesuaian Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Teori Perencanaan Sumber Daya Manusia Jackson dan Schuler

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penanggung jawab program perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat diperoleh hasil analisis keterkaitan atau kesesuaian proses perencanaan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan teori perencanaan sumber daya manusia menurut Jackson dan Schuler (1990) sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Kesesuaian Proses Perencanaan Kebutuhan SDM di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Teori**

No.	Tahap Perencanaan	Keterangan	Kesesuaian
1.	Pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diespektasikan bagi perencanaan masa depan	Proses pengumpulan data dan analisis hanya dilakukan dengan membandingkan hasil laporan saja tanpa melakukan <i>indepth interview</i> dengan masing-masing penanggungjawab di setiap daerah	Tidak Sesuai
2.	Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia	Kegiatan perumusan tujuan telah tertera dalam Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Sesuai

**Tabel 4.8 Kesesuaian Proses Perencanaan Kebutuhan SDM di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Teori**

No.	Tahap Perencanaan	Keterangan	Kesesuaian
3.	Merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia	Menyusun alternatif program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode ABK (Angka Beban Kerja) dan SKM (Standar Ketenagaan Minimal)	Sesuai
4.	Mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan	Pengawasan dan Evaluasi telah dilakukan untuk menilai pelaksanaan tahap 1 hingga 3 telah dilakukan sesuai prosedur.	Sesuai

#### **4.9 Hambatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM di Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, hambatan-hambatan yang dapat ditemui saat proses pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM adalah :

**a. Data, Informasi, dan Hasil Perhitungan Kebutuhan SDM belum sesuai**

Hal tersebut terjadi akibat pengelola perencanaan kebutuhan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan maupun dinas kesehatan kabupaten/ kota sering berganti. Sehingga pemahaman pengelola terkait penyusunan perencanaan kebutuhan SDM masih kurang yang akhirnya membuat proses pengumpulan data tidak tepat waktu dan kesulitan dalam melakukan analisis.



**b. *Server* sering bermasalah**

Terdapat keluhan bahwa akses internet lamban karena *server* mudah *down* ketika pengelola mengakses aplikasi *online* perencanaan kebutuhan SDM. Hal tersebut terjadi karena aplikasi *online* perencanaan kebutuhan SDM dilaksanakan dalam rentang waktu yang bersamaan untuk skala nasional.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan serta tugas pembantuan diperkuat dengan adanya struktur organisasi serta visi dan misi organisasi.
2. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan dengan fungsi sebagai berikut : penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan tugas-tugas lain
3. Seksi sumber daya manusia kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai 6 (enam) tugas yang harus dijalankan salah satunya menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
4. Tahap penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM tingkat Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui 7 (tujuh) tahapan, yaitu : sosialisasi, advokasi, pembentukan tim pengarah dan pelaksana, penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM, kompilasi hasil perhitungan kebutuhan SDM, analisis data dan informasi, serta memasukan Data, Informasi, dan Hasil Analisis ke dalam Format Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Tingkat Provinsi
5. Setelah melakukan analisis, diketahui terdapat kesesuaian antara tahapan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM tingkat Provinsi Jawa

Timur dengan tahapan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan.

6. Hambatan yang terjadi saat proses penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM tingkat Provinsi adalah data, informasi, dan hasil perhitungan masih belum sesuai serta *server* sering bermasalah.

## 5.2 Saran

1. Pihak Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Provinsi Jawa Timur sebaiknya menyusun petunjuk teknis secara ringkas dan jelas terkait perhitungan perencanaan kebutuhan SDM karena selama ini masih terpaku pada buku manual.
2. Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat mempertimbangkan bagan alir (*flowchart*) yang telah dibuat oleh mahasiswa magang sebagai petunjuk teknis dalam proses perencanaan kebutuhan SDM di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Flippo, Edwin B, 1996, Manajemen Personalia, Terjemahan Nitisemito, Alex S. 1996. Manajemen Personalia dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ketiga, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2000. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua, Cetakan XIV. BPFE. Yogyakarta.
- Mondy, R. Wayne, and Robert M. Noe. 2005. Human Resource Management. Ninth Edition. USA: Prentice Hall.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2018. Struktur Organisasi SDM Kesehatan tahun 2018
- Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

**LAMPIRAN**

**Lembar Berita Acara Perbaikan Seminar Magang**

**BERITA ACARA PERBAIKAN (BAP)  
SEMINAR LAPORAN MAGANG**

Nama : Tashya Angelie Tamara  
NIM : 101611133035  
Waktu Pelaksanaan : Senin, 09 Maret 2020  
Program Studi : S1 Kesehatan Masyarakat  
Minat Studi : Administrasi Kebijakan Kesehatan  
Judul Magang : Proses Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi Tahun 2019  
Dosen Penguji :  
1. Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes.  
2. Nuzulul Kusuma Putri, S.KM., M.Kes.  
3. Inge Dhamanti, S.KM., M.PH., Ph.D.  
4. Laura Navika Yamani, S.Si., M.Si., Ph.D.

Mahasiswa,



Tashya Angelie Tamara  
101611133035

**BERITA ACARA PERBAIKAN  
SEMINAR LAPORAN MAGANG**

Nama : Tashya Angelie Tamara  
 NIM : 101611133035  
 Waktu Pelaksanaan : Senin, 09 Maret 2020  
 Program Studi : S1 Kesehatan Masyarakat  
 Minat Studi : Administrasi Kebijakan Kesehatan  
 Judul Magang : Proses Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019  
 Dosen Penguji : Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes.

No.	Halaman	Saran Perbaikan
1.	-	Perubahan judul laporan dari “Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019” menjadi “Proses Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019”
2.	36	Menambahkan langkah perhitungan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan menggunakan metode ABK dan SKM
3.	39	Menambahkan teori perencanaan sumber daya manusia kemudian dianalisis kesesuaian teori dengan pelaksanaan perencanaan kebutuhan di Dinas Kesehatan Provinsi

Dosen Penguji,

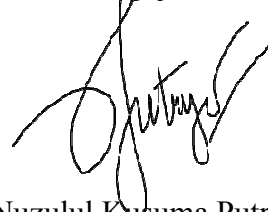
  
 Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes.  
 NIP. 198603232015041003

**BERITA ACARA PERBAIKAN  
SEMINAR LAPORAN MAGANG**

Nama : Tashya Angelie Tamara  
 NIM : 101611133035  
 Waktu Pelaksanaan : Senin, 09 Maret 2020  
 Program Studi : S1 Kesehatan Masyarakat  
 Minat Studi : Administrasi Kebijakan Kesehatan  
 Judul Magang : Proses Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019  
 Dosen Penguji : Nuzulul Kusuma Putri, S.KM., M.Kes

No.	Halaman	Saran Perbaikan
1.	-	Menambahkan tinjauan pustaka
	32	Menambahkan konsep perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (5W+1H)
2.	36	Menambahkan langkah perhitungan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan menggunakan metode ABK dan SKM
3.	23	Membuat bagan alir ( <i>flowchart</i> ) proses perencanaan kebutuhan sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dosen Penguji,



Nuzulul Kusuma Putri, S.KM., M.Kes  
 NIP. 198805032014042004

**BERITA ACARA PERBAIKAN  
SEMINAR LAPORAN MAGANG**

Nama : Tashya Angelie Tamara  
 NIM : 101611133035  
 Waktu Pelaksanaan : Senin, 09 Maret 2020  
 Program Studi : S1 Kesehatan Masyarakat  
 Minat Studi : Administrasi Kebijakan Kesehatan  
 Judul Magang : Proses Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019  
 Dosen Penguji : Inge Dhamanti, S.KM., M.PH., Ph.D

No.	Halaman	Saran Perbaikan
1.	-	Perubahan judul laporan magang dari “Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019” menjadi “Proses Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019”
2.	36	Menambahkan langkah perhitungan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan menggunakan metode ABK dan SKM
3.	23	Membuat bagan alir ( <i>flowchart</i> ) proses perencanaan kebutuhan sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dosen Penguji,



Inge Dhamanti, S.KM., M.PH., Ph.D  
 NIP. 198012242005012002

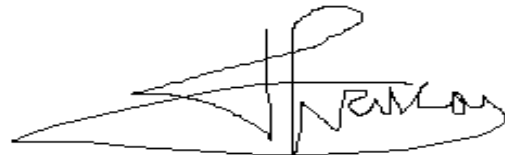


**BERITA ACARA PERBAIKAN  
SEMINAR LAPORAN MAGANG**

Nama : Tashya Angelie Tamara  
 NIM : 101611133035  
 Waktu Pelaksanaan : Senin, 09 Maret 2020  
 Program Studi : S1 Kesehatan Masyarakat  
 Minat Studi : Administrasi Kebijakan Kesehatan  
 Judul Magang : Proses Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019  
 Dosen Penguji : Laura Navika Yamani, S.Si., M.Si., Ph.D.

No.	Halaman	Saran Perbaikan
1.	36	Menjelaskan lebih spesifik mengenai proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2.	23	Membuat bagan alir ( <i>flowchart</i> ) proses perencanaan kebutuhan sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dosen Penguji,



Laura Navika Yamani, S.Si., M.Si., Ph.D.  
 NIP. 198601082018032001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PERIZINAN MAGANG**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618  
Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>, E-mail: [info@fkm.unair.ac.id](mailto:info@fkm.unair.ac.id)

Nomor : 8042/UN3.1.10/PPd/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan izin magang

12 Nopember 2019

Yth. Kepala  
Dinas Kesehatan  
Provinsi Jawa Timur  
Jl. Ahmad Yani No. 118  
SURABAYA

Sehubungan dengan pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana (S1) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020, dengan ini kami mohon Saudara mengizinkan mahasiswa, atas nama (terlampir).

Sebagai peserta magang di Instansi Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Dekan,  
Wakil Dekan I  
Dr. Santi Martini, dr., M.Kes.  
NIP 196609271997022001

Tembusan :

1. Dekan FKM UNAIR;
2. Ketua Departemen Epidemiologi, FKM UNAIR;
3. Ketua Departemen Biostatistik & Kependudukan, FKM UNAIR;
4. Ketua Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan, FKM UNAIR;
5. Ketua Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, FKM UNAIR;
6. Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR;
7. Koordinator Magang Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR;
8. Yang bersangkutan.

Scanned by CamScanner



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>, E-mail: [info@fkm.unair.ac.id](mailto:info@fkm.unair.ac.id)

**DAFTAR NAMA PESERTA MAGANG  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Peminatan	Tempat Magang	Pembimbing	Pelaksanaan
1.	Anugrah Lintang Indrawati	101611133058	Epidemiologi	Bagian Penyakit Tidak Menular	Dr. Lucia Yovita Hendrati, S.KM., M.Kes	23 Desember 2019 s.d. 24 Januari 2020
2.	Nida Luthfina	101611133097				
3.	Indria Dwi Saraswati	101611133037				
4.	Annisa Nur Illahi	101611133191		Bagian Surveillans	Laura Navika Yamani, S.Si., M.Si., Ph.D	
5.	Alya hanifa Rasyidi	101611133147				
6.	Made Nita Sintari	101611133161		Bagian Penyakit Menular	Prof. Dr., Chatarina Umbul Wahyuni, dr., M.S., MPH	
7.	Erren Silvia Herdiyani	101611133045				
8.	Elvira Revita	101611133042				
9.	Armya Zakiah Safitri	101611133182				
10.	Tashya Angelie Tamara	101611133035	Administrasi & Kebijakan Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Ilham Aksanu Ridlo, S.KM., M.Kes	Januari s.d. Februari 2020
11.	Aldila Mazaya Ghaisani	101611133158				
12.	Ana mariatul Ulfa	101611133082				
13.	Riphyana Novayanti	101611133031				

Scanned by CamScanner



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

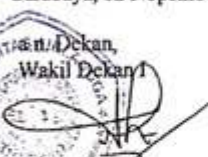
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>, E-mail: [info@fkm.unair.ac.id](mailto:info@fkm.unair.ac.id)

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Peminatan	Tempat Magang	Pembimbing	Pelaksanaan
14.	Salsabila Naim	1016111218	Biostatistika	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Yuly Sulistyorini, S.KM., M.Kes	23 Desember 2019 s.d. 24 Januari 2020
15.	Nadiyah Firdaus	101611133114				
16.	Dianatul Fitri	101611133141				
17.	Ita mamlu'atul Mufidah	101611133165				
18.	Annisa Fitrah Alifia	101611133160	PKIP	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Riris Diana Rachmayanti, SKM., M.Kes	6 Januari s.d. 6 Februari 2020
19.	Ferina Agustia Y.	101611133121				
20.	M. Baharrudin Wisudawan	101611133063				
21.	Putri Faradina H.	101611133357				
22.	Nabila Maliha	101611133178				








Surabaya, 12 Nopember 2019















  
 n. Dekan,  
 Wakil Dekan  
 Dr. Safty Martini, dr., M.Kes.  
 NIP-196609271997022001





Scanned by CamScanner

**LAMPIRAN**  
**LEMBAR CATATAN KEGIATAN**

Nama Mahasiswa : Tashya Angelie Tamara  
 NIM : 101611133035  
 Tempat Magang : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
<b>Minggu Ke-1</b>		
Senin, 6 Januari 2020	1. Pengenalan lingkungan tempat kerja 2. Koordinator mahasiswa magang memberikan penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi staf Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan beserta nama stafnya 3. Membantu melanjutkan <i>editing</i> peta persebaran mengenai data tenaga kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019	
Selasa, 7 Januari 2020	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu mengoreksi data rumah sakit terbaru di Jawa Timur tahun 2019 3. Membantu melanjutkan <i>editing</i> peta persebaran mengenai data tenaga kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019	
Rabu, 8 Januari 2020	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu mengoreksi data rumah sakit terbaru di Jawa Timur tahun 2019 3. Membantu melanjutkan <i>editing</i> peta persebaran mengenai data tenaga kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019	
Kamis, 9 Januari 2020	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu melanjutkan <i>editing</i> peta persebaran mengenai data tenaga kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019	
Jum'at, 10 Januari 2020	1. Membantu melanjutkan <i>editing</i> peta persebaran mengenai data tenaga kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019	
<b>Minggu Ke-2</b>		
Senin, 13 Januari 2020	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu melanjutkan <i>editing</i> peta persebaran mengenai data tenaga kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019	
Selasa, 14 Januari 2020	1. Membantu melanjutkan <i>editing</i> peta persebaran mengenai data tenaga kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019	

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Rabu, 15 Januari 2020	1. Membantu melanjutkan <i>editing</i> peta persebaran mengenai data tenaga kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 2. Membantu mengedit dan merekap data pendayagunaan dokter spesialis angkatan I Provinsi Jawa Timur tahun 2019 3. Membuat catatan kegiatan dan absensi magang	
Kamis, 16 Januari 2020	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu membuat surat undangan	
Jum'at, 17 Januari 2020	1. Membantu mengedit dokumen deskripsi bidang SDM tahun 2019	
<b>Minggu Ke-3</b>		
Senin, 20 Januari 2020	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu mengedit dokumen deskripsi SDM tahun 2019	
Selasa, 21 Januari 2020	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu mengurus perihal administratif di sie SDM	
Rabu, 22 Januari 2020	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu mengurus perihal administratif di sie SDM	
Kamis, 23 Januari 2020	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu merekap data Persyaratan Angka Kredit (PAK)	
Jum'at, 24 Januari 2020	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu merekap data Persyaratan Angka Kredit (PAK)	
<b>Minggu Ke-4</b>		
Senin, 27 Januari 2020	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu merekap data Persyaratan Angka Kredit (PAK)	
Selasa, 28 Januari 2020	1. Membantu mengurus perihal administratif di sie SDM 2. Menyusun laporan magang	
Rabu, 29 Januari 2020	1. Membantu mengurus perihal administratif di sie SDM 2. Menyusun laporan magang	
Kamis, 30 Januari 2020	1. Mengikuti apel pagi 2. Meyusun laporan magang	
Jum'at, 31 Januari 2020	1. Mengikuti olahraga bersama 2. Membantu merekap data Persyaratan Angka Kredit (PAK)	
<b>Minggu Ke-5</b>		
Senin, 3 Februari 2020	1. Mengikuti apel pagi 2. Meyusun laporan magang	

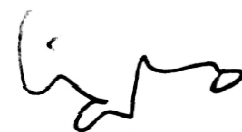
<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Paraf Pembimbing Instansi</b>
Selasa, 4 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>indepth interview</i> dengan penanggung jawab program</li> <li>2. Menyusun laporan magang</li> </ol>	
Rabu, 5 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>indepth interview</i> dengan penanggung jawab program</li> <li>2. Menyusun laporan magang</li> </ol>	
Kamis, 6 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>indepth interview</i> dengan Kepala Bidang SDM</li> <li>2. Menyusun laporan magang</li> </ol>	
Jumat, 7 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pamit</li> </ol>	

**LAMPIRAN**  
**LEMBAR ABSENSI HARIAN MAGANG**

Daftar Absensi Mahasiswa Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2020

No.	Waktu	Aldila Mazaya Ghaisani		Tashya Angelie Tamara	
		Datang	Pulang	Datang	Pulang
1	Senin, 6 Januari 2020				
2	Selasa, 7 Januari 2020				
3	Rabu, 8 Januari 2020				
4	Kamis, 9 Januari 2020				
5	Jum'at, 10 Januari 2020				
6	Senin, 13 Januari 2020				
7	Selasa, 14 Januari 2020				
8	Rabu, 15 Januari 2020				
9	Kamis, 16 Januari 2020				
10	Jum'at, 17 Januari 2020				
11	Senin, 20 Januari 2020				
12	Selasa, 21 Januari 2020				
13	Rabu, 22 Januari 2020				
14	Kamis, 23 Januari 2020				
15	Jum'at, 24 Januari 2020				
16	Senin, 27 Januari 2020				
17	Selasa, 28 Januari 2020				
18	Rabu, 29 Januari 2020				
19	Kamis, 30 Januari 2020				
20	Jum'at, 31 Januari 2020				
21	Senin, 3 Februari 2020				
22	Selasa, 4 Februari 2020				
23	Rabu, 5 Februari 2020				
23	Kamis, 6 Februari 2020				
25	Jum'at, 7 Februari 2020				

Surabaya, 8 April 2020  
Pembimbing Instansi,



drg. Rifanda Bachraini Firdaus  
NIP 198406072011012010



**LAMPIRAN  
FOTO KEGIATAN MAGANG**



**LAMPIRAN**  
**FOTO KEGIATAN MAGANG**

